



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA EVALUASI PENDIDIKAN TINGGI (EVALUASI DIKTI) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO). 2. Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia. 3. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Hari/Tanggal	: Senin, 26 Maret 2018.
Pukul	: 11.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabag. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Tugas dan Fungsi Peneliti dalam Memajukan Pendidikan Tinggi. 2. Kebijakan Kemenristekdikti Terkait Hak dan Kewajiban Peneliti. 3. Capaian dan Permasalahan Peneliti. 4. Masukan dan Usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi.
Hadir Anggota Panja	: 21 orang dari 27 Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.
Hadir Undangan	: Prof. Bambang Subiyanto, Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) dan pengurus lainnya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.42 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M./Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO)

1. HIMPENINDO menyampaikan paparan Masukan Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) terkait Evaluasi Pendidikan Tinggi sebagaimana **terlampir**, sebagai bagian dari referensi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah.
2. HIMPENINDO menyampaikan capaian dan permasalahan antara lain sebagai berikut:
 - a. Indonesia masih sangat kekurangan peneliti, yaitu hanya 89 peneliti per 1 juta penduduk. Meskipun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) menargetkan jumlah peneliti mencapai 1.071 orang per 1 juta penduduk, namun jumlah terkecil dibanding negara anggota G20 lainnya.
 - b. Pemerintah perlu merevisi PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memperpendek usia pensiun pada Jabatan Fungsional Madya termasuk Jabatan Fungsional Peneliti Madya dari usia 65 tahun menjadi usia 60 tahun.
 - c. Jumlah SDM pelaku riset (dosen, peneliti, perekayasa dan teknisi riset) dan pembiayaan masih jauh dari tingkat "*critical mass*", sehingga *output* riset masih belum menonjol.
3. HIMPENINDO menyampaikan masukan dan usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi antara lain sebagai berikut:
 - a. Mendorong agar Perguruan Tinggi, utamanya PTN BH, untuk membuka regulasi yang memungkinkan adanya *program study by research* di bidang keilmuan dengan menggunakan fasilitas laboratorium di Pusat Penelitian (Lembaga Litbang), sehingga Profesor Riset di Lembaga Litbang tersebut dapat menjadi salah satu pembimbing atau promotor.
 - b. Mendorong kerjasama riset antara Perguruan Tinggi, K/L, Lembaga Litbang, dan Industri dalam bentuk Konsorsium Riset atau Riset Multi Disiplin yang berlandaskan tantangan bersama, dengan *sharing* kapasitas kepakaran (SDM), fasilitas laboratoriu, dan jaringan riset.
 - c. Mendorong sektor industri dan masyarakat turut serta dalam pembiayaan kerjasama riset yang terkait produk-produk kebutuhan industri, dengan berfokus pada jenis riset terapan dan pengembangan eksperimental, sehingga dapat menggunakan fasilitas lembaga riset yang mengarah pada keuntungan dan daya saing industrinya. Perguruan Tinggi yang umumnya melakukan riset-riset dasar, dapat memperoleh lisensi teknologi sebagai sumber pendapatan dari sektor industri tersebut.

B. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI

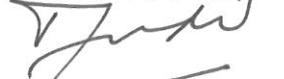
1. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan, masukan dan usulan dari HIMPENINDO sebagai bagian referensi pengambilan keputusan dan rekomendasi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.

2. Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI mendesak kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terkait dengan usia pensiun peneliti pada Jabatan Fungsional Madya dan Jabatan Fungsional Peneliti Madya dari usia 65 tahun menjadi usia 60 tahun.
3. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI meminta HIMPENINDO untuk menyampaikan:
 - a. Uraian data perkembangan jumlah peneliti per-K/L berdasarkan keangkatan dan fungsinya.
 - b. Kajian perlunya revisi PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya Pasal 239.
 - c. Kajian perlu disegerakannya penyelesaian RUU Sistem Nasional Iptek (Sinan Iptek) untuk mendukung perkembangan riset nasional.
 - d. Kajian tentang kerjasama Perguruan Tinggi, K/L, Lembaga Litbang, Industri dan masyarakat dalam membangun kerjasama riset nasional.
 - e. Pandangan tentang anggaran riset nasional yang proporsional, yang dibutuhkan untuk mendukung strategi riset nasional untuk lima tahun kedepan.
 - f. Tinjauan hal-hal penting dalam rangka pemajuan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi.
4. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI meminta HIMPENINDO untuk mensosialisasikan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan kepada seluruh peneliti di Indonesia
5. Meminta HIMPENINDO untuk menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada angka B.3. dalam bentuk tertulis paling lambat 10 April 2018.

6. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.

WA